

PERAN PANGKALAN TNI AL LAMPUNG DALAM PEMBINAAN POTENSI MARITIM GUNA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT

Freddy Johanis Rumambi

Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Indonesia

Email: freddyrumambi@ibmasmi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pangkalan TNI AL Lampung dalam pembinaan potensi maritim guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Lantamal, Petugas penyelenggara Penataan Ruang Laut, dan masyarakat pesisir Pantai Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam. Analisis data Miles & Huberman dipilih guna menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pangkalan TNI AL Lampung dalam pembinaan potensi maritim guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar adalah: 1) melakukan sosialisasi kelestarian biota laut; 2) menyelenggarakan program penanaman bakau; dan 3) melaksanakan program rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem laut.

Kata Kunci: lantal lampung, potensi maritim, ekonomi, masyarakat

Abstract

This study aims to determine the role of the Lampung TNI AL Base in fostering maritime potential to improve the economy of the surrounding community. This research is a case study research with a qualitative approach. The research informant consisted of the Head of the Maritime Potential Service (Kadispotmar) Lantamal, Marine Spatial Management officers, and the coastal community of Lampung Beach. Data collection was carried out using observation techniques and in-depth interviews. Miles & Huberman's data analysis was chosen to present comprehensive and in-depth research results. The results of the study show that the role of the Lampung TNI AL Base in fostering maritime potential in order to improve the economy of the surrounding community is: 1) conducting socialization of marine biota preservation; 2) organize a mangrove planting program; and 3) carry out a rehabilitation program against damage to marine ecosystems.

Keywords: lantal lampung; maritime potential; economy; society

How to cite:	Freddy Johanis Rumambi (2023), Peran Pangkalan Tni Al Lampung Dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Vol. 8, No. 5, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.v8i5.11811
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya berupa kepulauan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan harus dioptimalkan (Subagiyo et al., 2017). Indonesia berada di posisi silang yang memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Indonesia khususnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer (Marsetio, 2013). Seiring dengan melimpahnya potensi maritim Indonesia, maraknya kerusakan ekosistem maritim dewasa ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan secara lebih lanjut guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan di kemudian hari, sehingga perlu adanya Tindakan penyadaran kepada masyarakat. Tindakan penyadaran ini membutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mewujudkannya (Nugraha & Mulyono, 2017). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyadaran. Dengan Langkah strategis maka pesan-pesan dan tujuan yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga akan menimbulkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau akan terbentuk kesadaran untuk melestarikan ekosistem laut dan dapat melestarikan potensi maritim didalamnya demi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat besar. Sumber daya alam hayati berupa hasil perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam nonhayati berupa hasil tambang dan minyak bumi serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan nasional (Dahuri, 2001). Namun demikian dengan semakin meningkatkan pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, serta banyaknya pihak yang berkepentingan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya laut juga semakin meningkat. Kondisi ini tentu akan mengancam kelangsungan ekosistem dan mengancam keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan yang bergantung pada sumber daya alam laut tersebut. Sumber daya pesisir merupakan komoditas yang terbatas, sementara terdapat banyak pihak yang saat ini berlombalomba untuk memanfaatkannya. Tata ruang wilayah pesisir yang tidak diperhatikan, pemanfaatan sumber daya pesisir yang berlebihan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang bias, serta rendahnya partisipasi masyarakat akan mengerucut pada pengelolaan pesisir yang kurang optimal (Deswan et al., 2020).

Dalam melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Indonesia, 2004). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut agar berjalan dengan baik, maka perlu adanya dukungan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang cukup memadai dari segi pelayanan dan dukungan logistik. Salah satu tugas TNI

Angkatan Laut adalah menjalin sinergitas dengan masyarakat untuk melakukan pembinaan potensi maritim guna menjaga kelestarian ekosistem hayati sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Banyaknya sektor maupun pihak yang mempunyai kepentingan pada pembangunan wilayah pesisir membuat kompleksnya pengelolaan wilayah pesisir, beberapa kebijakan bersifat saling tumpang tindih bahkan sering bertabrakan, sehingga kerugian yang sangat besar telah dirasakan oleh masyarakat, (Kismartini & Bungin, 2019; (Hartono et al., 2023); (Lanni, 2023). Pembangunan di sekitar pesisir akan memberikan dampak ekologis yang signifikan tatkala kebijakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan pesisir. Beberapa permasalahan pesisir yang umumnya dihadapi saat ini, diantaranya adalah kerusakan mangrove, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran air laut (Jubaedah & Anas, 2019); Talipata & Mashoreng, 2019; (Sinaga et al., 2023). Kerusakan di wilayah pesisir tersebut merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dari pihak yang menjalankan pembangunan dan masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi lingkungannya karena mengeksploitasi sumber daya alam pesisir yang tidak ramah lingkungan, contohnya praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) karena menggunakan bom, bahan peledak, dan bius.

Dampak langsung dari penggunaan bahan peledak ini akan merusak dan menghancurkan terumbu karang (Dimas, n.d.). Selain itu, dapat terjadi kematian ikan target dan ikan nontarget, berikut juvenile dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak yang bersifat destruktif (Lanni, 2023). Sedangkan dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal. Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang (Ayal et al., 2021). Sementara praktik penangkapan ikan dengan bahan beracun/bius akan berdampak lebih parah dari bom ikan. Hal tersebut terjadi karena titik penyemprotan untuk mendapatkan ikan memperhatikan arus air sehingga racun lebih banyak mengenai bagian tubuh karang. Karang bercabang (*branching coral*) banyak dipatahkan untuk memperoleh ikan yang berukuran kecil. Sedangkan pada penggunaan bahan peledak, karang dapat hancur namun masih memiliki kesempatan untuk hidup Kembali (Zamili, 2022).

Metode Penelitian

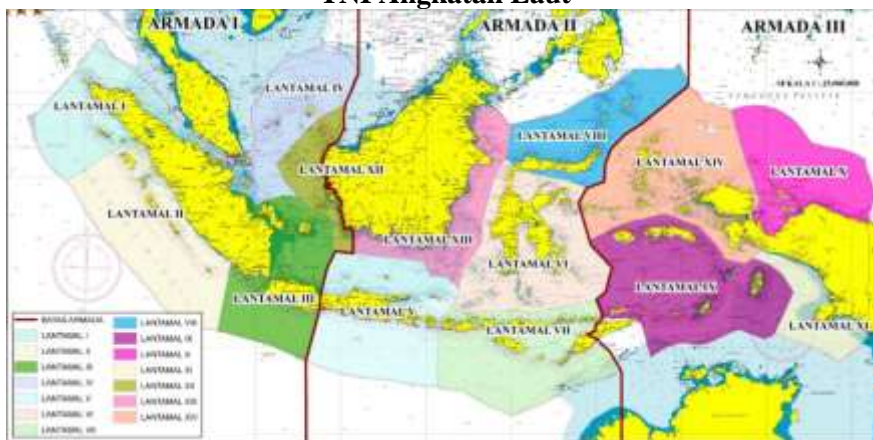
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Assyakurrohim et al., 2023), penelitian studi kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Pada penelitian ini peneliti menggunakan cara perolehan informan dengan cara purposive atau dengan sengaja sebelum melakukan penelitian. Peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Lantamal, Petugas penyelenggara Penataan Ruang

Laut, dan masyarakat pesisir Pantai Lampung. Data penelitian terkumpul dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian dengan mengambil data pada penelitian ini adalah Pangkalan Angkatan Laut Lampung yang berkedudukan di Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Hasil dan Pembahasan

Pangkalan Angkatan Laut Lampung mempunyai tugas pokok dalam melakukan pembinaan kewilayahan terhadap potensi maritim yang ada di wilayah binaannya. Lanal Angkatan Laut Lampung berada di bawah satuan pelaksana di jajaran Lantamal III. Satuan pelaksana di jajaran Lantamal III yang meliputi: Mako Lantamal III Jakarta Timur, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lanal Panjang di Lampung, Lanal Merak di Banten, Lanal Pangkal Pinang di Bangka Belitung, Lanal Palembang di Sumatra Selatan, Lanal Cirebon di Jawa Barat, Lanal Bandung di Jawa Barat, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) di Jakarta, DKI Jakarta, Polisi Militer (Pomal) Lantamal III, Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Lantamal III, dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III Lampung Timur.

Gambar 1
Peta Wilayah Kerja Armada dan Pangkalan TNI Angkatan Laut



Upaya pembinaan terhadap potensi maritim di wilayah Lanal Angkatan Laut Lampung secara garis besar meliputi tiga kegiatan utama, yaitu 1) melakukan sosialisasi kelestarian biota laut; 2) menyelenggarakan program penanaman bakau; dan 3) melaksanakan program rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem laut.

Tabel 1
Dimensi, Indikator dan Temuan Pembinaan Potensi Maritim

Dimensi	Indikator	Temuan Hasil
Pembinaan potensi maritim	Sosialisasi kelestarian biota laut	Melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, memberikan edukasi kepada

	masyarakat agar mengenal ataupun mengetahui tentang sumber daya laut, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut serta menjaga dan melestarikan menjadi perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Program penanaman bakau	Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir berkelanjutan, dalam hal ini berupa penanaman mangrove. Penanaman mangrove sendiri selain sebagai upaya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan, juga sebagai upaya dalam memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dengan cara penanaman mangrove secara Padat Karya oleh masyarakat.
Program rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem laut.	kegiatan restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, serta pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan mangrove yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan keberlanjutan ekosistem.

Gambar 2
Studi Lapangan Pembinaan Potensi Maritim Lanal Lampung



a. Sosialisasi kelestarian biota laut

Keanekaragaman ikan yang tinggi menjadi perhatian besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi fenomena menarik yang terjadi hampir di setiap perairan di Indonesia. Kegiatan

tersebut mencakup pemanfaatan stok induk, stok bibit dan stok ikan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan produksi perikanan berkelanjutan. Namun, peningkatan pemanfaatan perikanan berpotensi mengancam kelanjutan stok spesies ikan yang akan berpengaruh terhadap ekosistem laut maupun dari segi ekonomi pelaku usaha perikanan. Terjadinya penurunan keanekaragaman ikan ini perlu diketahui faktor penyebabnya dan dampak yang akan ditimbulkan sehingga kedepannya dapat menentukan dan melakukan tindakan guna mengembalikan keanekaragaman sumberdaya ikan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi penurunan sumber daya laut yaitu adanya perubahan iklim dan perubahan kenaikan temperatur yang drastis. Namun, faktor lain yang sangat besar mempengaruhi penurunan tersebut adalah penambahan populasi manusia dimana mengakibatkan tingginya konsumsi ikan, aktivitas manusia yang menyebabkan berubahnya habitat makhluk hidup seperti konversi lahan serta penangkapan sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti penggunaan cantrang, fish trap, penggunaan bom ikan serta racun ikan. Alat tangkap ini sangat berbahaya dikarenakan dapat merusak ekosistem karang, rumput laut, lamun serta ikan yang tidak masuk dalam ikan konsumsi akan ikut terbawa alat tangkap dan kerusakan yang diakibatkan cukup besar sehingga butuh waktu lama untuk memulihkan sumber daya laut.

ya, saya paling kalau di undang-undang ada acara-acara penanaman mangrove terus terumbu karang, kegiatan-kegiatan itu kan sering dilaksanakan oleh pramuka juga, sering ada ini apa? Istilahnya kegiatan begitu. (CP)

“Adanya penerapan metode yang diberikan kepada masyarakat terutama untuk terumbu karang yang ada sosialisasi dan demonstrasi. Jadi masyarakat cepat nyambung, kalau hanya sekedar Penyuluhan duluan tapi istilahnya ada prakteknya langsung di lapangan” (NL)

Masih banyak masyarakat yang belum mengenal ataupun mengetahui tentang sumber daya laut, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut serta menjaga dan melestarikan menjadi perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka Panjang terutama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena Pangkalan Angkatan Laut Lampung melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut.

b. Program penanaman mangrove/bakau

Ekosistem mangrove memiliki kontribusi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia Hutan mangrove di Indonesia memiliki potensi besar dalam penyerapan CO²

dari atmosfer dan dapat menyimpannya dalam bentuk biomassa tubuh. Hutan mangrove Indonesia adalah yang terluas di dunia, yaitu sekitar 3,2 juta hektar, merupakan 22,4% dari keseluruhan luas mangrove di dunia (Soimin et al., 2018). Luasan Mangrove ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Pentingnya kegiatan penanaman mangrove bertujuan untuk merehabilitasi kawasan pesisir, juga sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai arahan dari Presiden RI. Sebagian besar wilayah pesisir dan lautan berada dalam kondisi terdegradasi, karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukkan yang baru. Berbagai aktivitas di wilayah darat maupun aktivitas di laut juga menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya Pemerintah bersama masyarakat adalah melakukan upaya rehabilitasi.

“Ada kegiatan oral camp kegiatan pelestarian nanti mereka kan bermalam, malam-malam tersebutkan mereka pagi paginya setelah ada kegiatan bersih lingkungan pantai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman kembali terumbu karang. untuk pemanfaatan dimasyarakat yang pertama biasa dirasakan itu adalah keberadaan ikan. Kegiatan sudah berlangsung sejak 2015. Jadi ya betul-betul peran Angkatan laut, lanal khususnya itu karena sudah masuk program kerja” (DW)

“Kalo untuk disamping itu kan yang biota bawah laut terumbu karang yang biasa kita laksanakan juga disamping apa namanya menjaga pelestarian lingkungan bawah laut biotanya kita juga melestarikan lingkungan yang seperti bakau. tanaman bakau untuk daerah apa namanya menjaga pelestarian lingkungan yang dipinggir pantai” (NY)

Kegiatan penanaman mangrove menjadi salah satu upaya Pangkalan Angkatan Laut Lampung dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir berkelanjutan, dalam hal ini berupa penanaman mangrove. Penanaman mangrove sendiri selain sebagai upaya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan, juga sebagai upaya Pemerintah dalam memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dengan cara penanaman mangrove secara Padat Karya oleh masyarakat.

c. Program Rehabilitasi Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut

Sebagai bentuk dukungan terhadap rehabilitasi kawasan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat di wilayah pesisir, Lanal Lampung tengah menyiapkan kegiatan rehabilitasi pesisir di sejumlah wilayah di pesisir Lampung Tak hanya penanaman mangrove, Lanal Lampung juga melaksanakan kegiatan restorasi dan beberapa kegiatan lainnya yang ditujukan untuk keberlanjutan ekosistem. Program rehabilitasi

kawasan bukan hanya dalam bentuk penanaman mangrove saja, namun juga restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, serta pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan mangrove yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan keberlanjutan ekosistem.

“Oh ya Perlu sekali ditingkatkan pak, apalagi bapak bupati kita itu kan mengharuskan setiap desa harus ada destinasi wisata apalagi yang daerah-daerah pantai kalau dia lingkungan hidupnya rusak ya semuanya hancur terus gimana, ya terus harus dilestarikan” (CP)

“Ada pembinaan maksudnya terhadap nelayan menyangkut terumbu karang yang harus dilestarikan, kalau yang rusak yang direhabilitasi lagi supaya tidak semakin parah” (PD)

Sebagian besar wilayah pesisir dan laut berada dalam kondisi terdegradasi karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukan yang baru. Berbagai aktivitas di wilayah darat maupun aktivitas di laut juga menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem laut. Program rehabilitasi ini menekankan pada pentingnya ruang laut sebagai tempat penghidupan, sumber bahan pangan, aktualisasi budaya, dan penopang perekonomian bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dalam pembinaan potensi maritim guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar terdiri dari adalah: 1) melakukan sosialisasi kelestarian biota laut; 2) menyelenggarakan program penanaman bakau; dan 3) melaksanakan program rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem laut. Pembinaan potensi maritim merupakan sinergitas dan koordinasi antara TNI Angkatan Laut yang secara spesifik di bawah Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Lantamal, Sub Dinas Penataan Ruang Laut dan masyarakat pesisir Pantai Lampung yang berprofesi sebagai nelayan. Potensi kemaritiman Indonesia perlu senantiasa diupayakan mengingat melimpahnya kekayaan sumber daya laut Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *Triton: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125–134.
- Dahuri, R. (2001). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 17(2), 139–171.
- Deswan, F., Gultom, R. A. G., & Harsono, G. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dalam Penentuan Keseuaian Lokasi Rencana Pangkalan Tni Angkatan Laut Di Wilayah Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. *Teknologi Penginderaan*, 2(1).
- Dimas, M. G. (N.D.). *Kerusakan Biota Laut Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak*.
- Hartono, P. G., Wijaya, R., Hartono, A. B., Dizar, S., Magetsari, O. N. N., Anggara, I. S., & Sujono, M. I. (2023). Factors Affecting Stock Price Of Maritime Companies In Indonesia. *Aip Conference Proceedings*, 2675(1), 50005.
- Indonesia, S. N. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran Ri Tahun*, 34.
- Jubaedah, I., & Anas, P. (2019). Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 59–75.
- Lanni, R. (2023). Analisis Komunikasi Penyadaran Masyarakat Terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir Oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama Tni Al Vi Di Pulau Kodingareng Lompo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 1068–1079.
- Marsetio, A. (2013). *Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*. Jakarta.
- Nugraha, E., & Mulyono, M. (2017). *Laut Sumber Kehidupan*. Stp Press.
- Sinaga, R. R. K., Maulid Al-Wira'i, R., Kurniawan, F., Roni, S., & Hidayati, J. R. (2023). Kondisi Kesehatan Terumbu Karang Di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas. *Jurnal Akuatiklestari*, 6, 85–91.

Soimin, M., Gaertner, A., Comas, A. T., & Van Tuijl, C. (2018). Potensi Mitigasi Karbon Hutan Mangrove Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 414–419.

Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Universitas Brawijaya Press.

Zamili, P. A. S. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 191–203.

Copyright holder:

Freddy Johanis Rumambi (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

